

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Indrianti Sulistia Ningsih<sup>1)</sup>, Nawarti Bustamam<sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Riau  
nawarti@eco.uir.ac.id

### Abstract

*This study aims to determine the effect of government outrage and unemployment on poverty in North Sumatra province. The type of data used in this study is secondary data in the form of annual quantitative figures from 2011 to 2020. This study used the method of multiple linear regression analysis and used several tests, namely statistical tests and classical acidification tests. The data is processed using the eviews 10 application. From the results of this study, it is known that: 1) Government expenditure has a negative and significant effect on poverty in North Sumatra Province, 2) Unemployment has a positive and significant effect on poverty in North Sumatra province.*

**Keywords:** *Government Spending, Unemployment, Poverty.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari *annual quantitative figures* tahun 2011-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan beberapa pengujian yaitu uji statistik dan *classical acidification tests*. Data diolah menggunakan aplikasi eviews 10. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, 2) Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata kunci:** Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Kemiskinan.

## PENDAHULUAN

Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup besar bagi pemerintah. Kemiskinan terus menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, karena selama ini pemerintah Indonesia masih belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Kemiskinan bukan cuma bersangkutan dengan tinggi rendahnya konsumsi dan pendapatan, tetapi juga bersangkutan dengan tinggi rendahnya pendidikan, kesehatan dan ketidakmapuan masyarakat miskin untuk ikut didalam proses pembangunan.

Menurut Sharp et al (dalam Maipita, 2014) kemiskinan dapat disebabkan oleh (a) rendahnya kualitas angkatan kerja, (b) akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, (c) rendahnya tingkat penguasaan teknologi, (d) penggunaan

sumber daya yang tidak efisien dan, (e) pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemiskinan masih menyebar di provinsi yang ada di Indonesia salah satunya terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara pada tahun 2011-2020**

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2011	10,83
2012	10,41
2013	10,39
2014	9,85
2015	10,79
2016	10,27
2017	9,28
2018	8,94
2019	8,63
2020	9,14

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011-2020 yang paling tinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 10,83 %. Tahun 2019 merupakan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara terendah yaitu sebesar 8,63%. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kemiskinan di provinsi Sumatera Utara ialah pengangguran. Pengangguran memiliki andil dalam mempengaruhi kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa di provinsi Sumatera Utara kerap mempunyai jumlah pengangguran yang cukup tinggi yang bisa mempengaruhi kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Pengangguran bisa terjadi dikarenakan munculnya kesenjangan diantara pembuka lowongan pekerjaan terhadap jumlah pencari kerja yang mencari pekerjaan.

Pengangguran bisa mempengaruhi nilai pendapatan yang sudah didapat selama ini, yang bisa mengakibatkan turunnya nilai kesejahteraan masyarakat. Jika lapangan pekerjaan tidak bisa menerima semua para pencari kerja yang ada, hal itu bisa menambah nilai pengangguran (Mahmud,2016).

**Tabel 2**  
**Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2011-2020**

Tahun	Pengangguran (Jiwa)
2011	402.125
2012	380.982

2013	412.202
2014	390.712
2015	428.794
2016	372.000
2017	377.288
2018	396.027
2019	383.438
2020	507.805

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2020 yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 507.805 jiwa. Pada tahun 2016 merupakan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara terendah yaitu sebesar 372.000 jiwa.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan selain pengangguran yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ialah salah satu bagian kebijakan fiskal yang memiliki sebuah tujuan yang akan meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja untuk kestabilan ekonomi, dan juga menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Keynes (Muhammed, 2014), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan jumlah pengeluaran di perekonomian. Keynes beranggapan perluasan belanja pemerintah bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi

**Tabel 3**  
**Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Tahun 2011-2020.**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)</b>
2011	4.611,47
2012	7.633,63
2013	7.260,47
2014	7.808,56
2015	7.959,17
2016	9.476,42
2017	12.518,86
2018	12.563,39
2019	13.440,32
2020	12.653,60

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2020 yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13.440,32 Miliar rupiah. Tahun 2011 merupakan pengeluaran pemerintah terendah yaitu sebesar 4.611,47 Miliar rupiah. Pengeluaran pemerintah bisa meningkat karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat yang menerima layanan, peningkatan penyediaan (supply) layanan pemerintah dari para penerima layanan, dan meningkatnya ketidakefisienan pemberian pelayanan.

Naik turunnya pengeluaran pemerintah dan pengangguran tentu saja bisa mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah yang tinggi diperlukan agar bisa membuka dan menerima tenaga kerja yang pada akhir bisa menurunkan nilai kemiskinan yang ada. Bila jumlah pengangguran disebuah negara cukup tinggi, maka terkadang bisa menaikkan persentase penduduk miskin. Pengangguran dan persentase penduduk miskin harus terus ditekan supaya kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul sebagai berikut: **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara”**. Kemiskinan yang dimaksud pada penelitian ini adalah Persentase penduduk miskin.

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA KEMISKINAN**

Menurut Niemietz (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barkebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Menurut BPS (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran.

### **UKURAN KEMISKINAN**

Menurut Arsyad (2004) terdapat beberapa macam cara untuk mengukur kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif:

#### **1. Kemiskinan Absolut**

Suatu keadaan dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

#### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan, misalnya jumlah pengangguran per kekurangan pekerjaan.

### **PENYEBAB KEMISKINAN**

Permasalahan kemiskinan tentu merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, kondisi lingkungan, dan faktor lainnya yang berkaitan. Kemiskinan ditandai dengan ketinggalan dan keterbelakangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya pendapatan yang diterima.

Tingkat pendidikan yang rendah juga dapat menjadi pemicu dari kemiskinna, karena masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang memadai, sehingga tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Hal tersebut lah yang dapat membuat angka kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi (bertambah). Kuncoro (2010) berpendapat bahwa kemiskinan dapat muncul karena adanya faktor-faktor berikut:

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan berasal dari kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata
2. Kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas sumber daya manusia, sumber daya manusia yang berkualitas rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya menyebabkan upah rendah.

### **KRITERIA KEMISKINAN**

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Rahmawati (2011) terdapat berbagai macam kriteria miskin menurut Sayogyo. Dasar pengukuran garis kemiskinan Syogyo adalah pendapat keluarga, yang ditambah dengan nilai harga beras yang berlaku saat itu dan rata-rata anggota rumah tangga. Berdasarkan kriteria tersebut, Sayogyo membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok:

#### **1. Sangat Miskin**

Kelompok ini termasuk mereka yang pendapatannya setara dengan 240 kg setara beras per orang per tahun, penduduk yang tinggal di perkotaan.

#### **2. Miskin**

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal di desa, sedangkan untuk penduduk yang tinggal di perkotaan berkisar 360 sampai 480 kg.

#### **3. Hampir cukup**

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan 320 kg beras sampai 480 kg beras dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, serta diatas 720 kg untuk penduduk yang tinggal di perkotaan.

#### 4. Cukup

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya lebih dari 480 kg beras tiap orang dalam setahun untuk penduduk yang tinggal di pedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang per tahun untuk yang tinggal di perkotaan.

### **PENGANGGURAN**

Menurut Nanga (2005: 249) mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS, 2001: 8).

### **DAMPAK PENGANGGURAN**

Sukirno (2000:514) berpendapat bahwasannya pengangguran dapat menimbulkan dampak buruk yang dibedakan dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
  - a. Menyebabkan penerimaan pajak negara yang lebih rendah
  - b. Tidak mendorong pertumbuhan ekonomi
  - c. Bisa menghambat masyarakat untuk memaksimalkan pendapatan nasional yang sebenarnya lebih kecil dari pendapatan nasional.
2. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat
  - a. Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan
  - b. Hilangnya keterampilan
  - c. Pengangguran menimbulkan masalah social di masyarakat.

### **PENGELUARAN PEMERINTAH**

Pengeluaran Pemerintah (publik) ialah sumberdaya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah dan diselenggarakan dengan cara tidak langsung oleh masyarakat. Pengeluaran publik ialah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menata berjalannya perekonomian dengan menetapkan tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin dalam penerimaan dan pengeluaran nasional, Sadono Sukirno (2000: 192). Pengeluaran pemerintah berfungsi agar mampu mewujudkan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak mampu diwujudkan oleh swasta (Suparmoko,1998).

### **DASAR CAMPUR TANGAN PEMERINTAH**

Perlunya campur tangan atau intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah dengan beberapa alasan antara lain adalah untuk pengadaan barang publik, adanya monopoli, timbulnya eksternalitas, dan adanya alasan lain. (Suparmoko 2000: 339-343)

## **HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN**

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jika pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun maka diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

## **HUBUNGAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN**

Ada keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang meningkat dapat menimbulkan dampak yang buruk kepada perekonomian sebuah daerah, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan maka tidak dapat menghasilkan jasa dan barang. Hal tersebut juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. Jika pendapat perkapita rendah itu akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan menurun dan meningkatnya persentase penduduk miskin, persentase penduduk miskin akan meningkat apabila pengangguran bertambah. Hal yang dapat terjadi yang disebabkan oleh pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan yang telah dicapai oleh masyarakat (Mulyadi,2012).

## **HIPOTESIS**

Berikut ini adalah hipotesis yang di ajukan pada penelitian ini:

H1: Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

H2: Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian terdapat pada Provinsi Sumatera Utara, dengan cara menganalisis data yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sehingga penulis berkeinginan untuk memahami situasi kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Ada beberapa jenis data yang ada pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa angka kuantitatif time series dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara,yaitu:



- a) Data Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah) tahun 2011-2020
  - b) Data Pengangguran (Jiwa) tahun 2011-2020
  - c) Data Penduduk Miskin (persen) tahun 2011-2020
2. Ada juga yang terdapat pada sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti google, buku, dan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

### **Populasi Dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series selama 10 tahun dari tahun 2011-2020, sehingga populasi dan sampel tidak dipakai dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang diterapkan didalam penulisan ialah dengan dokumentasi. Dokumentasi ialah data yang terdapat di BPS dalam bentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan dan dalam buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan sebagainya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang diterapkan didalam penulisan ialah dengan dokumentasi. Dokumentasi ialah data yang terdapat di BPS dalam bentuk laporan tahunan yang telah dipublikasikan dan dalam buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, ada beberapa pengujian dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Analisis Regresi Linear Berganda, uji Statistik: uji t, uji F, Uji Koefisien Determinasi, Uji Asumsi Klasik: uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara**

Penduduk merupakan sebagai modal dasar dan juga faktor dominan pembangunan yang harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu dalam pembangunan, penduduk tidak hanya di pandang sebagai objek saja tetapi juga sebagai subjek dalam penggerak pembangunan. Salah satu faktor yang akan memperlambat tercapainya kondisi penduduk yang ideal yaitu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan diiringi dengan pertumbuhan yang cepat. Hal ini yang mendasari pentingnya dorongan dari kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam daerah tersebut dan daya tampung lingkungan agar persebaran penduduk antar daerah dapat optimal.

Perkembangan penduduk merupakan perubahan populasi dari waktu ke waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukurannya. Sebutan untuk



pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia saja dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi atau kependudukan, sedangkan perkembangan penduduk digunakan untuk merujuk pada perkembangan penduduk dunia.

**Tabel 3**

**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2011-2020**

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Perkembangan Penduduk Miskin (%)
2011	10,83	-
2012	10,41	-0,03
2013	10,39	-0,00
2014	9,85	-0,05
2015	10,79	0,09
2016	10,27	-0,04
2017	9,28	-0,09
2018	8,94	-0,03
2019	8,63	-0,03
2020	9,14	0,05

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011-2020 yang paling tinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 10,83%. Sedangkan persentase penduduk miskin yang terendah adalah pada Tahun 2019 yaitu dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,63% atau mengalami penurunan sebesar -0,03% dibanding tahun sebelumnya.

**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang memiliki tujuan dalam peningkatan laju investasi, kesempatan kerja untuk kestabilan ekonomi, dan juga menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pengeluaran pemerintah juga merupakan salah satu instrument penting yang memegang peranan dalam mengurangi kemiskinan.

**Tabel 4**

**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2020**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (%)
2011	4.611,47	-
2012	7.633,63	0,65

2013	7.260,47	-0,04
2014	7.808,56	0,07
2015	7.959,17	0,01
2016	9.476,42	0,19
2017	12.518,86	0,32
2018	12.563,39	0,00
2019	13.440,32	0,06
2020	12.653,60	-0,05

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Pengeluaran Pemerintah tahun 2011-2020 dimana pengeluaran pemerintah yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 13.440,32 Milyar rupiah atau mengalami perkembangan pengeluaran pemerintah sebesar 0,06%. Sementara itu pengeluaran pemerintah yang paling rendah adalah pada tahun 2011 ialah sebesar 4.661,47 Miliar rupiah.

### **Perkembangan Pengangguran Provinsi Sumatera Utara**

Pengangguran dapat terjadi karena terdapat ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa muncul meskipun jumlah harapan tinggi, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan informasi, keterampilan dasar selain yang dibutuhkan dan bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur.

Pengangguran bisa mempengaruhi pendapatan yang sudah didapat, yang bisa menjadi faktor rendahnya kemakmuran masyarakat, Sukirno (2006). Apabila lapangan pekerjaan tidak bisa mengambil semua tenaga kerja yang tersedia sehingga itu bisa menaikkan nilai pengangguran, Mahmud (2016).

**Tabel 5**

### **Pekembangan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2020**

Tahun	Pengangguran (jiwa)	Perkembangan Pengangguran (%)
2011	402.125	-
2012	380.982	-0,05
2013	412.202	0,08
2014	390.712	-0,05
2015	428.794	0,09
2016	372.000	-0,13
2017	377.288	0,01
2018	396.027	0,04
2019	383.438	-0,03
2020	507.805	0,32

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021*

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2020 dimana pengangguran yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 507.805 jiwa atau mengalami perkembangan pengangguran sebesar 0,32%. Sedangkan pengangguran yang terendah adalah pada Tahun 2012 yaitu dengan pengangguran sebesar 380.982 jiwa atau mengalami penurunan pengangguran sebesar -0,05% dibandingkan tahun sebelumnya.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya suatu produk total suatu daerah, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan rakyat.

**Tabel 6**

#### **Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2022**

Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
Sumatera Utara	2018	2019	2020	2021	2022
	5,18	5,22	-1,07	2,61	3,90

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2022*

Berdasarkan tabel 6 dijelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,22%. Tahun 2020 merupakan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang terendah yaitu sebesar -1.07%.

### **Kondisi Penduduk Provinsi Sumatera Utara**

Penduduk provinsi Sumatera Utara terbagi kedalam beragam suku bangsa dan beragam latar belakang sosial, ekonomi, agama dan budaya. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara yaitu dari berbagai macam suku seperti: Batak, Melayu, Nias, Mandailing, Jawa, dan Tionghoa.. Penduduk Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 15,18 juta jiwa pada juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,42 juta jiwa atau setara dengan 68,62% penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah kelompok usia produktif 15-64 tahun).

Jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang paling terbesar terdapat pada Kota Medan Sebanyak 2.279.894 jiwa dan Jumlah penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 terkecil terdapat pada Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 48.935 jiwa.

### **Kondisi Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera utara**

Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 9,14% mengalami kenaikan sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,63%. Masalah yang terdapat pada kemiskinan tidak cuma jumlah ataupun persentase

penduduk miskin. Banyak juga hal lain yang perlu diperdulikan ialah intensitas dan seberapa parah kemiskinan tersebut. Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara juga meningkat sebesar 0,06% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 0,05% pada tahun 2019.

### **Kondisi Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara**

Pengeluaran pemerintah adalah serangkaian produk yang dihasilkan yang dijadikan pilihan atau keputusan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah adalah jumlah keputusan anggaran di setiap tingkat pemerintahan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 12.653,60 Miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 786,72 Miliar rupiah di banding tahun 2019 sebesar 13.440,32 Miliar rupiah.

### **Kondisi Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara**

Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 tercatat sebesar 507.805 dari total penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.350 juta orang di Provinsi Sumatera Utara. Pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 507.805 orang, meningkat 124.367 orang dari 383.438 orang pada tahun 2019. Angkatan kerja di provinsi Sumatera Utara mencapai 6,96 juta orang, turun 87.000 orang sejak Februari 2019. Jumlah pengangguran ini tidak dapat mencegah kemiskinan di provinsi ini Sumatera Utara karena jumlahnya bervariasi setiap tahun. Artinya, terjadinya pasang surut yang tidak merata terus menimbulkan kemiskinan.

## **Pembahasan**

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dipakai dalam memahami pengaruh variabel bebas ialah pengeluaran pemerintah dan pengangguran pada variabel terikat adalah kemiskinan. Di bawah ini adalah data dari hasil analisis regresi linier berganda memakai pengolahan data aplikasi E-views 10 memakai metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada bab ini dianggap sebagai peramalan terbaik karena bisa memenuhi tolak ukur teori ekonomi, statistik, dan ekonometrika. Hasil estimasi ini diharapkan mampu menjawab hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, yang akan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Dependent Variable: PENDUDUK MISKIN				
Method: Least Squares				
Date: 08/11/22 Time: 10:31				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.30339	7.792750	5.685206	0.0007
PENGELUARAN_PEME RINTAH	-4.594180	1.081963	-4.246154	0.0038
PENGANGGURAN	4.470291	1.296429	3.448157	0.0107
R-squared	0.737176	Mean dependent var		9.853000
Adjusted R-squared	0.662084	S.D. dependent var		0.800764
S.E. of regression	0.465489	Akaike info criterion		1.551867
Sum squared resid	1.516758	Schwarz criterion		1.642643
Log likelihood	-4.759336	Hannan-Quinn criter.		1.452287
F-statistic	9.816913	Durbin-Watson stat		1.163616
Prob(F-statistic)	0.009307			

*Sumber: Hasil Olah data Eviews 10, 2022*

Berdasarkan tabel 8 hasil analisis regresi linear berganda dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 44.30339 - 4.594180X_1 + 4.470291X_2 + \epsilon$$

Berdasarkan manfaat dari persamaan yang terdapat diatas, dapat dilihat nilai koefisien dari masing-masing variabel. Di bawah ini, pengertian nilai koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

- 1) Nilai konstanta  $b_0$  sebesar 44.30339 artinya besarnya Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara apabila pengeluaran pemerintah dan pengangguran sama dengan 0 adalah sebesar 44,30339 %.
- 2) Nilai Koefisien  $b_1$  sebesar -4.594180 berdasarkan uji T diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Yang dimaksud disini ialah apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen maka akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 4,594180% dan begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen maka akan menaikkan persentase penduduk miskin sebesar 4,594180%.

- 3) Nilai koefisien  $b_2$  sebesar 4.470291 berdasarkan uji T diketahui variabel Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Maksudnya adalah apabila terdapat peningkatan pengangguran sebanyak satu persen maka bisa menaikkan persentase penduduk miskin sebesar 4,470291% dan begitupun sebaliknya apabila terjadi penurunan pengangguran sebesar satu persen maka akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 4,470291%.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Diketahui nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,737176 Artinya bahwa variabel bebas (pengeluaran pemerintah dan pengangguran) mampu memprediksi variabel penduduk miskin sebesar 73%. Sedangkan sisanya 27% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

### **Uji T (Uji Parsial)**

- 1) Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah ( $X_1$ ) Terhadap Persentase Penduduk miskin(Y)

Berlandaskan hasil uji t, bisa ditemukan nilai t probabilitas Pengeluaran Pemerintah ialah sebanyak  $0,0038 < \alpha (0,05)$  lalu  $H_0$  ditolak. Itu artinya secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Pengujian Pengaruh Pengangguran ( $X_2$ ) Terhadap Persentase Penduduk Miskin (Y)

Berlandaskan hasil uji t, bisa ditemukan nilai t prob pengangguran ialah sebanyak  $0,0107 < \alpha (0,05)$  lalu  $H_0$  ditolak. Itu menjelaskan secara parsial pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

### **Uji F**

Dari hasil uji F, ditemukan bahwa nilai F probabilitas ialah sebesar  $0,009307 < \alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Yang berarti menyatakan variabel pengeluaran pemerintah dan pengangguran berpengaruh secara simultan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

## Uji Asumsi Klasik

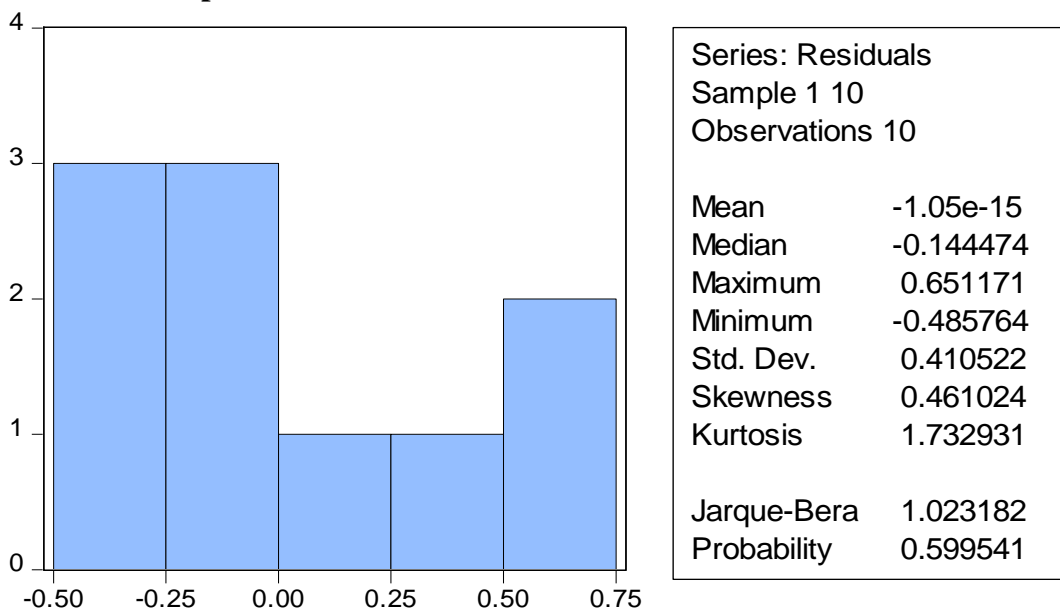
Uji Asumsi klasik menggunakan 4 pengujian, yaitu:

### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dipakai dalam menegvaluasi distribusi data pada suatu data variabel terlepas dari data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal.

**Grafik 1**

### Hasil Uji Normalitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2022

Berdasarkan Grafik 1 hasil Uji Normalitas diatas dapat dilihat bahwa nilai J-B sebesar  $1,023182 < \text{Chi Square } 14,0671$  maka  $H_0$  ditolak. Sesuai dengan ketentuan apabila nilai J-B lebih kecil dari Chi Square maka data tidak terdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan agar mengetahui ada tidaknya hubungan linier antara variabel bebas. Adanya hubungan antar variabel didalam satu regresi disebut juga dengan multikolinieritas. Pengujian ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai  $VIF < 10$  maka tidak terkena multikolinieritas, dan jika nilai  $VIF > 10$  maka terkena multikolinieritas.



**Tabel 9**  
**Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara**

Variance Inflation Factors			
Date: 08/11/22 Time: 10:34			
Sample: 1 10			
Included observations: 10			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	60.72696	2802.614	NA
PENGELUARAN_			
PEMERINTAH	1.170643	8936.258	6.946934
PENGANGGURAN	1.680728	2358.284	6.946934

*Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2022*

Berdasarkan tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas, maka diketahui nilai VIF dari variabel bebas yaitu nilai VIF  $X_1$  ialah 6.946934, nilai VIF  $X_2$  ialah 6.946934. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari kedua variabel bebas tersebut lebih kecil dari 10 yang artinya kedua variabel bebas tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut berarti pengeluaran pemerintah dan pengangguran tidak memiliki hubungan linier didalam model regresi tersebut..

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan agar mengetahui apakah variasi residual konstan atau tidak. Dalam hal ini variasi residual yang tidak konstan bisa memunculkan masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.646014	Prob. F(5,4)	0.6821
Obs*R-squared	4.467550	Prob. Chi-Square(5)	0.4842
Scaled explained SS	0.802229	Prob. Chi-Square(5)	0.9769

*Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2022*

Berdasarkan hasil tabel 4.9 Hasil uji heteroskedastisitas di atas bisa dilihat nilai chi-kuadrat ( $Obs \cdot R\text{-squared}$ ) ialah sebesar  $0,4842 > 0,05$  sehingga  $H_0$  di terima yang artinya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah kajian statistik yang digunakan untuk menentukan korelasi variabel dalam model peramalan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Uji ini mengartikan hasil tahun tertentu dipengaruhi oleh tahun sebelumnya ataupun tahun berikutnya. Memastikan ada atau tidaknya autokorelasi bisa dilakukan memakai uji Durbin Watson.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai DW sebesar 1,163616. Dilihat dari kurva DW, nilainya berada di antara DU dan 4-DL dan masuk dalam kriteria non-autokorelasi. Artinya tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif dalam model regresi linier.

Melihat dari hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan diProvinsi Sumatera Utara pada pembahasan ini bisa mendapatkan hipotesis sebagai berikut:

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**

Berlandaskan hasil penelitian diatas, maka dari nilai t probabilitas secara parsial dapat dilihat bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan diProvinsi Sumatera Utara. Dimana nilai koefisien Pengeluaran Pemerintah sebesar  $-4,594180$ , yang berarti setiap Pengeluaran Pemerintah naik sebesar satu persen itu akan menurunkan kemiskinan sebesar  $4,594180\%$ . Ini mengartikan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdapat diProvinsi Sumatera Utara telah dapat mengakses pembangunan dengan cukup baik. Hal ini juga disebabkan Pengeluaran Pemerintah merupakan cerminan dari usaha pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan diProvinsi Sumatera Utara. Penelitian ini cocok dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Isabella Calina Ketaren (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat sukirno (2004) yang menyatakan pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi Negara.

## **Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**

Berlandaskan penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa hasil estimasi dari suatu model regresi, ditemukan variabel pengangguran memiliki nilai t prob ialah sebanyak  $0,0107 < \alpha 0,05$  sehingga  $H_0$  di tolak. Ini memperjelas bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. Yang artinya jika pengangguran naik satu persen itu akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,0107%. Ini dikarenakan efek dari pengangguran yang mengurangi pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kekayaan atau kesmakhmuran. Menurut pendapat sukirno (2004) yang menyatakan dampak buruk dari pengangguran yaitu mengurangi pendapatan masyarakat, hal ini yang akan mengurangi tingkat kemakhmuran juga kesejahteraan yang seharusnya seluruh masyarakat rasakan. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2020) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berlandaskan dari hasil pembahasan dan penelitian yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Pengeluaran pemerintah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara maka bisa di simpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan negative terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai koefisien yang didapat ialah sebesar -4,594180 dan uji t dengan nilai prob yang didapat ialah sebesar 0,0038. Situasi ini dapat memperlihatkan kenaikan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga cocok dengan landasan teori dan hipotesis yang dipakai pada penelitian ini, dimana Pengeluaran Pemerintah mengalami kenaikan maka akan searah dengan turunnya kemiskinan.
2. Variabel Pengangguran ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan nilai koefisien yang didapat ialah sebesar 4,470291 dan uji t dengan nilai prob yang didapat ialah sebesar 0,0107. Pengaruh positif tersebut artinya apabila pengangguran naik 1% maka nilai kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga akan naik sebesar 4,47% dan begitupun sebaliknya, apabila pengangguran turun sebesar 1% maka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga akan turun sebesar 4,47%. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, bahwasannya jika

pengangguran meningkat maka kemiskinan juga naik, jika pengangguran menurun maka kemiskinan juga akan turun.

### **Saran**

Berlandaskan kesimpulan yang tertera di atas, maka peneliti memberikan masukan baik, yang mungkin nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan oleh bagian pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulis. Adapun saran tersebut:

1. Bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian serupa dengan menggunakan objek yang sama, ada baiknya terlebih dahulu membuat peningkatan variabel-variabel supaya hasil yang ingin diperoleh akan menjadi lebih bagus dari penelitian penulis.
2. Bagi masyarakat, kami berharap masyarakat bisa lebih memanfaatkan lagi seluruh pengeluaran pemerintah seperti fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan diharapkan mampu memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada agar mampu mengurangi kemiskinan.
3. Bagi pemerintah, kami berhadap supaya pemerintah mampu membuat strategi pembangunan yang lebih baik lagi, terutama untuk masyarakat miskin supaya bisa menurunkan nilai kemiskinan dengan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan sehingga peluang untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan semakin besar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2021), Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2020.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2021), Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2021.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2021), Jumlah Pengangguran Bermur 15 Tahun keatas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2020.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2022), Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2020), Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2022), Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.*

*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2022), Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2018-2022.*

Harahap, Tuty Lisa Alawiyah (2020). *Analisis Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*. Riau: Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau.

Ketaren, Isabella Calina (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2, No. 2, Tahun 2018. ISSN: 2614-5154.

Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhammed, A. (2014). *Government Spending for Economic Growth in Ethiopia*. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.9.

Sukirno, Sadono (2019), *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada